



**ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH  
PADA PROVINSI YANG DIBENTUK SEBELUM  
DAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA  
UU NO. 22 TAHUN 1999**

**TESIS**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Manajemen

**MERCU BUANA**

**ADETYA CAHYA NINGRAT**

**55110110160**

**PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MERCU BUANA  
2015**

## **ABSTRACT**

*Comparative Performance Analysis of Financial Management in the Era of Regional Autonomy In The Province Formed Before And After application of Law No. 22, 1999, in a period of Fiscal Year 2010 - 2013. In the implementation of regional autonomy, finance is an important factor that needs serious attention. In this connection it is necessary for performance assessment and financial capacity of local governments to determine the development of the financial management area every year. This study used a descriptive study with a qualitative approach. The results showed that the Province's financial capability is formed prior to the enactment of Law no. 22 of 1999 is still in the criteria Both the average ratio of 45.38% DOF. Provincial financial performance established before the enactment of Law no. 22, 1999, from 2010 to 2013 experienced a positive trend with an increase in the average level of financial independence 129.34%, 105.59% PAD effectiveness, priority allocation of expenditure is on recurrent expenditure, the growth ratio of revenue, income and spending growth are fluctuate. While the province formed after the enactment of Law no. 22 of 1999 is still in the criteria Enough with the average ratio of 30.12% DOF. Provincial financial performance established before the enactment of Law no. 22, 1999, from 2010 to 2013 experienced a positive trend with an increase in the average level of financial independence 129.34%, 105.59% PAD effectiveness, priority allocation of expenditure is on recurrent expenditure, the growth ratio of revenue, income and spending growth are fluctuate. This indicates there is no significant difference between the old province is formed before the Law no. 22 in 1999 and a new province that is formed after the Law no. 22, 1999 in the area of financial management performance. This indicates that in terms of the ability to manage local finance new provincial areas can match the old provincial areas that in fact more experienced in managing finances region.*

*Keywords: autonomy, financial capacity, financial performance Province in Indonesia in 2010-2013*

## ABSTRAK

Analisis Perbandingan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Otonomi Daerah Pada Provinsi Yang Dibentuk Sebelum Dan Setelah Diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999 dalam periode Tahun Anggaran 2010 - 2013. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, keuangan menjadi faktor penting yang perlu mendapat perhatian serius. Sehubungan dengan hal itu perlu dilakukan penilaian kinerja serta kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk mengetahui perkembangan pengelolaan keuangan daerah setiap tahun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan kemampuan keuangan Provinsi yang dibentuk sebelum diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 masih dalam kriteria Baik dengan rata-rata rasio DOF 45,38%. Kinerja keuangan Provinsi yang dibentuk sebelum diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 dari tahun 2010 hingga 2013 mengalami kecenderungan peningkatan yang positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 129,34%, efektifitas PAD 105,59%, prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin, pertumbuhan rasio PAD, Pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Sedangkan pada Provinsi yang dibentuk setelah diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 masih dalam kriteria Cukup dengan rata-rata rasio DOF 30,12%. Kinerja keuangan Provinsi yang dibentuk sebelum diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 dari tahun 2010 hingga 2013 mengalami kecenderungan peningkatan yang positif dengan rata-rata tingkat kemandirian keuangan 129,34%, efektifitas PAD 105,59%, prioritas alokasi belanja masih pada belanja rutin, pertumbuhan rasio PAD, Pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Hal ini mengindikasikan tidak ada perbedaan yang signifikan antara Provinsi lama yaitu yang dibentuk sebelum adanya UU no. 22 tahun 1999 dan Provinsi baru yaitu yang dibentuk sesudah adanya UU no. 22 tahun 1999 dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam hal kemampuan mengelola keuangan daerah daerah Provinsi baru dapat menyamai daerah Provinsi lama yang notabene sudah lebih berpengalaman dalam mengelola keuangan daerahnya.

Kata kunci: otonomi daerah, kemampuan keuangan, kinerja keuangan Provinsi di Indonesia tahun 2010-2013

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Analisis Perbandingan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah pada Provinsi yang Dibentuk Sebelum dan Setelah Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999

Bentuk Tesis : Penelitian

Nama : Adetya Cahya Ningrat

NIM : 55110110160

Program : Magister Manajemen Keuangan

Tanggal :

Mengesahkan

Pembimbing Utama

  
UNIVERSITAS  
MERCU BUANA  
(Dr. Dudi Rudianto, SE, M.Si)

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi Magister Manajemen



Prof. Dr. Ing-. Mudrik Alaydrus



Dudi Permana, Ph.D.,ST., MM

## PERNYATAAN *SIMILARITY CHECK*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan, bahwa karya ilmiah yang ditulis oleh

Nama : Adetya Cahya Ningrat  
NIM : 55110110160  
Program Studi : Magister Manajemen Keuangan

dengan judul

“ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH PADA PROVINSI YANG DIBENTUK SEBELUM DAN SETELAH DIBERLAKUKANNYA UU NO. 22 TAHUN 1999”, telah dilakukan pengecekan *similarity* dengan sistem Turnitin pada tanggal 10/04/2021, didapatkan nilai persentase sebesar 26%.

Jakarta, 10 – April – 2020

Administrator Turnitin

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA

  
**Arie Pangudi, A.Md**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa semua pernyataan dalam tesis ini :

Judul : Analisis Perbandingan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah pada Provinsi yang Dibentuk Sebelum dan Setelah Diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999

Bentuk Tesis : Penelitian

Nama : Adetya Cahya Ningrat

NIM : 55110110160

Program : Magister Manajemen Keuangan

Tanggal :

Merupakan hasil penelitian dan merupakan karya saya sendiri dengan bimbingan Dosen Pembimbing yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Program Studi Magister Manajemen Program Pascasarjana Universitas Mercu Buana.

Tesis ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar Kesarjanaan pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua informasi, data dan hasil pengolahannya yang digunakan, telah dinyatakan secara jelas sumbernya dan dapat diperiksa kebenarannya.

Jakarta, 25 Januari 2015



(Adetya Cahya Ningrat)

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah hingga penulis dapat merampungkan penyusunan usulan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi pada Provinsi yang Dibentuk Sebelum dan Setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999”. Usulan Penelitian ini disusun dalam rangka penyusunan Tesis yang menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dari Program Pascasarjana Universitas Mercubuana, Jakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Usulan Penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut.

Dengan tersusunnya Tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Allah SWT, dan Yth. Dr. Dudi Rudianto, SE, M.Si. selaku Dosen Pembimbing, yang berkenan memberi bimbingan, arahan dan masukan bagi tersusunnya Usulan Penelitian yang layak untuk disajikan. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada:

Yth. Rektor Universitas Mercubuana, Jakarta;

Yth. Direktur Ketua Program Pascasarjana Universitas Mercubuana,  
Jakarta;

Yth. Ketua Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas  
Mercubuana, Jakarta;

Yang sangat dicintai isteri dan yang teramat disayangi anak yang  
senantiasa menjadi inspirasi, memberi doa, dan dukungan selama berlangsungnya  
masa perkuliahan hingga memasuki masa penyelesaian perkuliahan;

Semua pihak yang telah membantu kegiatan penelitian pendahuluan; atas  
perhatian, perkenan dan bantuan yang telah diberikan hingga tersusunnya Tesis  
ini.



Adetya Cahya Ningrat S.Kom

UNIVERSITAS  
MERCU BUANA



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRCT.....	ii
ABSTRAK .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN SIMILARITY CHECK.....	v
PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	7
1.4. Tujuan Penelitian .....	9
1.5. Kegunaan Penelitian.....	10
<b>BAB II DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN</b>	
2.1. Otonomi Daerah di Indonesia .....	11
2.2. Pelaksanaan Otonomi Daerah di Masa Orde Baru.....	13
2.3. Pelaksanaan Otonomi Daerah setelah Masa Orde Baru.....	16
2.4. Daerah Otonomi Khusus dan Daerah Istimewa.....	24
<b>BAB III TINJAUAN TEORITIS</b>	
3.1. Kajian Teori .....	23
3.1.1. Otonomi Daerah .....	23
3.1.1.1. Pengertian Otonomi Daerah.....	24
3.1.1.2. Prinsip Otonomi Daerah Menurut UU No.32 Tahun 2004.....	25

3.1.1.3. Tujuan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia.....	27
3.1.1.4. Pemekaran Daerah sebagai Implikasi Otonomi Daerah.....	29
3.1.2. Pemekaran Wilayah .....	31
3.1.2.1. Pengertian, sebab dan Tujuan .....	31
3.1.2.2. Konsep Pengembangan Wilayah .....	36
3.1.2.3. Konsep Pemekaran Wilayah .....	37
3.1.2.4. Dasar Hukum Pemekaran Wilayah .....	38
3.1.2.5. Prosedur dalam Pemekaran Wilayah .....	40
3.1.3. Pembangunan Ekonomi.....	44
3.1.3.1. Definisi Pembangunan Ekonomi .....	44
3.1.3.2. Pembangunan Ekonomi Daerah.....	46
3.1.4. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	47
3.1.4.1. Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	47
3.1.4.2. Tujuan dan Manfaat Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	50
3.1.4.3. Pengelolaan Keuangan Daerah .....	51
3.1.4.4. Pendapatan Asli Daerah .....	52
3.2. Review Penelitian Terdahulu .....	59
3.3. Kerangka Konseptual .....	65
3.4. Hipotesis.....	67

#### BAB IV METODE PENELITIAN

4.1. Jenis/Desain Penelitian.....	69
4.2. Ruang Lingkup/Fokus Penelitian.....	69
4.3. Lokasi Penelitian .....	70
4.4. Pendekatan Penelitian .....	70
4.5. Variabel Penelitian .....	70
4.6. Populasi dan Sampel Penelitian .....	75

4.7. Jenis dan Sumber Data .....	76
4.8. Teknik Pengumpulan Data .....	77
4.9. Metode Analisis Data .....	78
4.9.1. Deskriptif Data .....	78
4.9.2. Uji Mann-Whitney (Independent Samples t test)....	79

## BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Analisis Rasio Keuangan Daerah.....	82
5.1.1. Analisis Rasio Keuangan Daerah Otonomi	
Sebelum tahun 1999 .....	83
5.1.1.1. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah .....	83
5.1.1.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	86
5.1.2.3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	89
5.1.2.4. Rasio Aktivitas Keserasian Belanja .....	92
5.1.2.5. Rasio Pertumbuhan ( <i>Growth Ratio</i> ).....	97
5.1.2. Analisis Rasio Keuangan Daerah Otonomi	
Setelah tahun 1999 .....	100
5.1.2.1. Rasio Kemampuan Keuangan Daerah .....	100
5.1.2.2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah .....	102
5.1.2.3. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah.....	103
5.1.2.4. Rasio Aktivitas Prioritas Belanja .....	105
5.1.2.5. Rasio Pertumbuhan ( <i>Growth Ratio</i> ).....	107
5.2. Uji Independent Sample t Test.....	110
5.2.1. Pengujian Kinerja Pengelolaan Keuangan	
Daerah tahun 2010 .....	110
5.2.2. Pengujian Kinerja Pengelolaan Keuangan	
Daerah tahun 2011 .....	118
5.2.3. Pengujian Kinerja Pengelolaan Keuangan	
Daerah tahun 2012 .....	126
5.2.4. Pengujian Kinerja Pengelolaan Keuangan	
Daerah tahun 2013 .....	134

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1. Kesimpulan .....	143
6.2. Saran.....	149
DAFTAR PUSTAKA .....	151
LAMPIRAN.....	154



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1.	Kategori Kemampuan Keuangan Daerah .....	72
Tabel 4.2	Pola hubungan, Kemandirian dan Kemampuan Daerah.....	73
Tabel 4.3.	Tingkat Efektivitas PAD.....	73
Tabel 4.4.	Operasionalisasi Variabel .....	74
Tabel 5.1.	Rasio Kemampuan Keuangan (DOF) Daerah Otonomi Sebelum tahun 1999.....	83
Tabel 5.2.	Kategori Kemampuan Keuangan Daerah .....	84
Tabel 5.3.	Pola Hubungan Rasio Kemampuan Keuangan (DOF) Daerah Otonomi Sebelum tahun 1999.....	84
Tabel 5.4.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Otonomi Sebelum 1999 .....	87
Tabel 5.5.	Pola Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.....	87
Tabel 5.6.	Pola Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) Daerah Otonomi Sebelum tahun 1999 .....	88
Tabel 5.7.	Rasio Efektivitas Daerah Otonomi Sebelum tahun 1999 .....	90
Tabel 5.8.	Tingkat Rasio Efektivitas.....	91
Tabel 5.9.	Tingkat Efektivitas Rasio Efektivitas Daerah Otonomi Sebelum tahun 1999.....	91
Tabel 5.10.	Rasio Aktivitas Belanja Rutin Daerah Otonomi Sesudah tahun 1999.....	93
Tabel 5.11.	Rasio Aktivitas Belanja Pembangunan Daerah Otonomi Sebelum tahun 1999.....	94
Tabel 5.12.	Keserasian Aktivitas Belanja Rutin dan Belanja Pembangunan Daerah Otonomi Sebelum tahun 1999 .....	96
Tabel 5.13.	Rasio Pertumbuhan PAD ( <i>Growth Ratio</i> ) Daerah Otonomi Sebelum tahun 1999.....	98
Tabel 5.14.	Rasio Pertumbuhan TPD ( <i>Growth Ratio</i> ) Daerah Otonomi Sebelum tahun 1999.....	99

Tabel 5.15.	Rasio Kemampuan Keuangan (DOF) Daerah Otonomi Sebelum tahun 1999.....	101
Tabel 5.16.	Pola Hubungan Rasio Kemampuan Keuangan (DOF) Daerah Otonomi Setelah tahun 1999 .....	101
Tabel 5.17.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Otonomi Sebelum tahun 1999.....	102
Tabel 5.18.	Pola Hubungan Rasio Kemandirian Keuangan (KKD) Daerah Otonomi Setelah tahun 1999 .....	103
Tabel 5.19.	Rasio Efektivitas Daerah Otonomi setelah tahun 1999 .....	104
Tabel 5.20.	Tingkat Efektivitas PAD Daerah Otonomi Sebelum tahun 1999.....	104
Tabel 5.21.	Rasio Aktivitas Belanja Rutin dan Pembangunan Daerah Otonomi Sesudah tahun 1999 .....	106
Tabel 5.22.	Rasio Pertumbuhan PAD ( <i>Growth Ratio</i> ) Daerah Otonomi Sebelum tahun 1999.....	108
Tabel 5.23.	Rasio Pertumbuhan TPD ( <i>Growth Ratio</i> ) Daerah Otonomi Sebelum tahun 1999.....	109
Tabel 5.24.	Perbandingan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2010 sebelum dan setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999.....	112
Tabel 5.25.	Independent t test tahun 2010 .....	116
Tabel 5.26.	Perbandingan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2011 sebelum dan setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999.....	120
Tabel 5.27.	Independent t test tahun 2011 .....	124
Tabel 5.28.	Perbandingan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2012 sebelum dan setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999.....	128
Tabel 5.29.	Independent t test tahun 2012 .....	132

Tabel 5.30. Perbandingan rata-rata kinerja pengelolaan keuangan daerah tahun 2013 sebelum dan setelah diberlakukannya UU No. 22 tahun 1999.....	136
Tabel 5.31. Independent t test tahun 2013 .....	140



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Proses Pengusulan Wilayah Pemekaran di Tingkat Daerah .....	41
Gambar 3.2.	Tahapan dan Prosedur Pembentukan Kabupaten/ Kota .....	42
Gambar 3.3.	Kerangka Konseptual .....	66
Gambar 4.1.	Kurva Dua Sisi .....	81





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Hasil Penelitian

Lampiran 2. Hasil Output SPSS

